

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya melaksanakan proses demokrasi, Indonesia telah menggelar pemilihan secara langsung baik dari tatanan nasional sampai daerah. Hal tersebut telah dilakukan sejak beberapa tahun ke belakang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilihan secara langsung telah diselenggarakan sejak terpilihnya presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia terpilih sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat atau yang biasa disebut dengan pemilu.

Sebagai negara demokrasi tentu melaksanakan pemilihan kepala negara maupun kepala daerah secara langsung harus benar-benar dilaksanakan. Mengingat dalam negara demokrasi sering dikatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan artinya rakyat memiliki hak secara penuh untuk menentukan pemimpinnya baik itu ditatanan nasional maupun daerah.

Terhitung sampai saat ini sejak 2004, Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum secara langsung sebanyak 4 kali dimana diantaranya pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Selain itu proses demokrasi juga dilaksanakan sampai pada tingkatan daerah atau yang biasa disebut dengan pilkada. Sama halnya dengan pemilu, pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian dari implementasi demokrasi dimana rakyat memilih langsung calon kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat daerah.

Saat ini Indonesia kembali menggelar pilkada serentak pada tahun 2020 dimana seperti yang dikutip <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020> bahwa pelaksanaan pilkada kali ini terdiri dari 270 daerah dimana diantaranya terdiri dari 9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota dimana salah satunya adalah Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun proses ataupun tahapan dalam pilkada kali ini diantaranya:

1. Pendaftaran pasangan calon
2. Penetapan pasangan calon
3. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon
4. Masa kampanye
5. Debat publik dan debat terbuka
6. dll.

Seperti halnya tahun-tahun politik sebelumnya, dalam upaya mengenalkan diri terhadap masyarakat saat ini sudah banyak tersebar pamphlet-pamflet yang merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Adapun isi dalam pamphlet tersebut tentunya tertera pula beberapa partai-partai yang menjadi pengusung ataupun pendukung dari tiap-tiap pasangan calon.

Salah satunya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang mana sudah terpasang di sepanjang jalan Kabupaten Tasikmalaya beberapa calon kepala daerah yang nantinya akan dipilih langsung oleh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya mulai dari Pasangan calon Azies Rismaya Mahpud dan Haris Sanjaya sampai pasangan Iwan Saaputra dan Iip Miptahul Paoz. Saat ini memang telah telah ditetapkan empat calon yang memang sudah memantapkan dirinya untuk merebut kursi nomor satu

di Kabupaten Tasikmalaya, baik yang memang maju melalui jalur perseorangan maupun atas dorongan partai politiknya.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah biasanya masing-masing calon akan melakukan kerjasama dengan beberapa *elite local* baik itu *elite* partai, *elite* agama (pesantren) ataupun *elite* pengusaha. Kerjasama yang dilakukan tidak lain tidak bukan tentunya sebagai upaya mensukseskan ataupun mendulang suara dalam proses kontestasi. Sebelumnya, di Kabupaten Tasikmalaya Uu Ruhzanul yang kini menjadi wakil gubernur Jawa Barat memiliki hubungan yang dengan pesantren mengingat ia pun sebagai Hamida (Himpunan Alumni Miftahul Huda) yang berada di Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Hubungan tersebut pun dapat dikatakan sangat kuat mengingat pada saat itu Uu dapat memenangkan kontestasi di Kabupaten Tasikmalaya bahkan dalam periode keduanya pasangan Uu-Ade tidak memiliki lawan dalam pemilihan Bupati Tasikmalaya.

Dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya sebetulnya sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum pada akhirnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya sejak dibukanya pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 4 sampai 6 september 2020.

Adapun dinamika politik yang terjadi menjelang pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020 diantaranya seperti Ahmad Tazakka Bonanza yang berasal dari Pondok Pesantren Idrisiyyah sebelumnya digadang-gadang akan diusung oleh partai demokrat sebagai Calon Bupati tiba-tiba tidak jadi mengingat demokrat lebih memilih untuk mengusung pasangan calon Azies dan Haris. Hal tersebut pada akhirnya membuat Ahmad Tazakka Bonanza gagal melaju menjadi Calon Bupati

Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu dinamika pun terlihat tatkala Azies mengunjungi beberapa bakal Calon Bupati seperti halnya Erry P dari partai Golkar sampai akhirnya Azies memilih Haris yang sebelumnya sebagai ketua DPC PKB. Kendati Haris merupakan kader PKB namun rupanya pasangan Azies dan Haris ini tidak mendapat dukungan dari PKB mengingat PKB memilih untuk memberikan SK nya kepada pasangan calon Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz.

Seiring berjalannya waktu dan proses dinamika yang terjadi, pada akhirnya saat ini Kabupaten Tasikmalaya memiliki empat pasangan calon yang nantinya akan menahkodai Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya diantaranya pasangan Azies Rismaya Mahpud dan Haris Sanjaya, Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin, Cep Zamzam Zulfikar Nur dan Fadil Kharsoma serta Pasangan Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz.

Dari keempat pasangan calon yang menjadi kandidat di pemilihan kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya ini tentunya memiliki *background* yang berbeda baik itu calon yang berlatar belakang sebagai tokoh agama, birokrat sampai pengusaha. Hal tersebut rupanya menjadikan kontestasi semakin menarik karena memang sebelumnya di Kabupaten Tasikmalaya hanya memiliki satu pasangan calon saja. Dengan latar belakang yang berbeda dari keempat pasangan calon kali ini pun cukup banyak mendapat sorotan ketika memang terdapat Calon Bupati yang berlatar belakang pengusaha.

Apabila dilihat dalam konteks demokrasi sebetulnya memang tidak ada salahnya siapapun itu dan berlatar belakang apapun, maka ia memiliki hak yang sama sebagai warga negara termasuk dalam mencalonkan dirinya sebagai calon ataupun wakil kepala daerah. Akan tetapi yang menjadi perbincangan di masyarakat

khususnya Kabupaten Tasikmalaya memandang bahwa adanya indikasi oligarki yang nantinya bisa saja terjadi ketika calon kepala daerah tersebut nantinya terpilih menjadi orang nomor satu di Kabupaten Tasikmalaya. Tak sedikit masyarakat yang menilai bahwa alih-alih melakukan pembangunan yang merata untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya melainkan malah membawa kepentingan perusahaannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sosok Azies Rismaya Mahpud merupakan seorang pengusaha yang berasal dari keluarga Mayasari Grup yang notabene merupakan perusahaan terbesar di Tasikmalaya dan juga sudah menysar ditatanan Nasional.

Bukan kali ini saja sebenarnya perusahaan Mayasari grup ini turut terlibat dalam proses kontestasi politik lokal, hal serupa juga pernah terjadi di Kota Tasikmalaya dimana pada saat itu Mayasari Grup turut serta dan terlibat secara langsung baik pada saat pemilihan eksekutif maupun dalam legislatif. Hematnya wajar ketika memang muncul kekhawatiran masyarakat terkait adanya indikasi oligarki yang akan dibangun dikemudian hari sebab seperti yang kita ketahui, secara umum oligarki dapat dipahami sebagai sistem kekuasaan yang dijalankan ataupun dikendalikan oleh salah satu golongan atau pihak yang berkuasa untuk kepentingan golongan itu sendiri.

Direktur Pengembangan Kesetaraan dan Studi Globalisasi Northwestern University dalam gresnews.com mengatakan bahwa dinamika politik pemerintah Indonesia hingga kini masih dikuasai para oligarki (elit) dengan kepentingan kekuasaan. Ia menegaskan, selepas era Orde Baru hingga memasuki masa reformasi, belum ada pola perubahan sistem pemerintahan yang fundamental dimana kekuasaan berbasis kepentingan masih membudaya dan terpelihara di

kalangan figur politik (<http://www.gresnews.com/berita/politik/100475-rantai-kekuasaan-oligarki-masih-jadi-budaya-politik-di-indonesia/>).

Lantas apakah dengan adanya keterlibatan pengusaha dalam kontestasi politik Kabupaten Tasikmalaya ini juga merupakan indikasi oligarki di Kabupaten Tasikmalaya kemudian hari. Dan hal tersebut pula yang kemudian mendorong penulis membuat karya tulis berjudul Indikasi Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dengan Studi Kasus Keterlibatan Perusahaan Mayasari Grup Dalam Kontesatsi Politik Kabupaten Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana keterlibatan oligarki dalam pilkada di Kabupaten Tasikmalaya 2020.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penelitian ini dibatasi pada bagaimana keterlibatan oligarki dalam pilkada di Kabupaten Tasikmalaya 2020.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterlibatan oligarki dalam pilkada di Kabupaten Tasikmalaya 2020.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian politik khususnya dalam hal Oligarki politik atau dalam hal ini keterlibatan oligarki dalam pilkada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat menyebarkan informasi serta masukan tentang kajian oligarki politik khususnya keterlibatan oligarki dalam pilkada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020.